

Jokowi Minta Masalah

Defisit Transaksi Berjalan Selesai Tahun Ini

Reporter: [Bisnis.com](http://bisnis.com)

Editor: [Rr. Ariyani Yakti Widyastuti](#)

Rabu, 5 September 2018 13:36 WIB



Presiden Joko Widodo atau Jokowi (kiri) memberikan hormat saat memimpin apel siaga NTB Bangun Kembali di lapangan Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat, NTB, Senin, 3 September 2018. Sebanyak 125 ribu unit rumah warga terdampak gempa Lombok dan Sumbawa ditargetkan selesai selama enam bulan. ANTARA/Ahmad Subaidi

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau [Jokowi](#) memastikan pemerintah telah bergerak cepat dalam memperbaiki fundamental ekonomi guna menahan pelemahan rupiah dari kejatuhan lebih dalam. Ia mengaku sudah menginstruksikan kepada para menterinya untuk meningkatkan koordinasi baik di sektor fiskal, moneter, dan industri termasuk pelaku-pelaku usaha.

Baca: [Rupiah Jeblok, Jokowi: Karena Faktor Eksternal Bertubi-tubi](#)

Jokowi menyebutkan koordinasi yang kuat menjadi kunci utama agar semua program bisa berjalan secara sinergis. "Target saya sudah saya berikan kepada menteri-menteri agar dalam satu tahun ini betul-betul ada perubahan di penyelesaian defisit transaksi berjalan," ujarnya sesuai melepas ekspor Toyota 1.879 unit CBU di Tanjung Priok Car Terminal, Rabu, 5 September 2018.

Soal pelemahan nilai tukar rupiah, Jokowi mengemukakan pelemahan nilai tukar terhadap dolar AS dialami hampir semua negara berkembang. Sejumlah faktor mulai dari perang dagang AS-China, krisis di beberapa negara berkembang (Argentina, Turki, Venezuela, dan Afrika Selatan), dan normalisasi moneter di AS.

"Saya kira yang paling penting kita harus waspada, kita harus hati-hati. Kuncinya memang hanya ada dua, yaitu investasi yang harus terus meningkat dan ekspor yang juga harus meningkat sehingga kita bisa menyelesaikan defisit transaksi berjalan," kata Jokowi.

Baca: [Jokowi Kembali Panggil Menteri Ekonomi Bahas Pelemahan Rupiah](#)

Hingga saat ini, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meredam penurunan rupiah. Beberapa langkah itu antara lain implementasi biodiesel, menaikkan pajak penghasilan barang impor, menunda beberapa proyek yang memiliki kandungan impor tinggi, serta meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam proyek-proyek pemerintah.

"Kalau kita bisa memakai semuanya komponen dalam negeri, akan ada penghematan kurang lebih US\$ 2 miliar-US \$3 miliar," ucap [Jokowi](#).

BISNIS